

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini persoalan angkutan umum mencuat kembali seiring dengan munculnya krisis moneter yang mengakibatkan berbagai aksi mogok, sehingga menimbulkan suatu ancaman yang selalu dilakukan oleh sopir maupun pengusaha angkutan umum. Mogok dilakukan oleh para sopir angkutan umum akibat tidak puasnya terhadap sistem yang berlaku saat itu, antara lain perubahan rute, pengalihan terminal, penambahan armada dan kenaikan tarif yang mengakibatkan penambahan jumlah setoran (Siswoyo, 2008).

Selagi pengusaha memikirkan penghasilan yang menyusut akibat menurunnya jumlah penumpang, lonjakan harga sukcadang juga menciptakan berbagai kesulitan, sehingga mengakibatkan pendapatan tidak dapat menutupi biaya operasi sehari-hari. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tertulis bahwa lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Artinya bahwa pengadaan dan penyelenggaraan angkutan umum itu ada pada pemerintah. Karena menyangkut kepentingan orang kebanyakan yang mampu mendukung kegiatan sosial dan ekonomi, maka penyelenggaraannya harus diatur secara ketat dan bijaksana. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pihak swasta lebih dominan sebagai operator, sementara peraturan yang kurang

jelasmengjadikanbanyak pelanggaran dan kesulitandalam mengatur penyelenggaraannya dilapangan(Siswoyo, 2008).

Modadapat diartikan sebagai tipe transportasi yangdigunakan dengan alternatif-alternatif sebagaiberikut :1) Pilihan pertama antara jalan kaki ataumenggunakan kendaraan,2) Jika kendaraan harus digunakan, apakahmerupakan kendaraan pribadi atauangkutan umum,3) Jika digunakan angkutan umum, jenisangkutan apa yang akan digunakan(angkot, taksi, bus atau yang lainnya).Bila terdapat lebih dari satu moda, makamoda yang dipilih adalah moda yangmempunyai rute terpendek, tercepat dantermurah atau kombinasi dari ketiganya (Hobbs. FD,1995 dalam Siswoyo, 2008).

Persoalan transportasi perkotaan dialami olehkotaberembang. Persoalan tersebutlebih dipersulit lagi dengan adanya persepsi yangcenderung memihak pada kelompok tertentudalam penyusunan kebijakan yang berkaitandengan pembangunan dan pengembangan sistemtransportasi perkotaan. Pemihakan dimaksudadalah pemihakan pada penggunaan kendaraanpribadi (*private car*) dan mengabaikan anggotamasyarakat lainnya. Tentu sajaorientasi kebijakan seperti ini akan berakibatfatal, di mana permasalahan transportasiperkotaan bukan menjadi terselesaikan denganbaik, tetapi malah semakin rumit(Dian.dkk, 2005).

Salah satu penyebabkemacetan di daerah perkotaan adalahmeningkatnya kecenderungan para pemakai jasatransportasi untuk menggunakan kendaraanpribadi dibandingkan dengan kendaraan umum.Selain membaiknya keadaan ekonomi yangmenyebabkan tingkat kepemilikan kendaraanpribadi semakin tinggi, menurunnya perananangkutan umum juga disebabkan oleh rendahnyatingkat pelayanan angkutan umum itu sendiri.Pada dasarnya, tingkat

pelayanan yang rendah itu menyangkut sarana dan prasarana yang kurang memadai, waktu tempuh yang cukup lama, jumlah penumpang yang melebihi kapasitas angkut, tingkat kenyamanan yang rendah, sistem jaringan yang kurang memadai, serta aksesibilitas yang sulit untuk beberapa daerah tertentu (Tamin, 2000 dalam Dian.dkk, 2005).

Untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tersebut, biasanya disediakan angkutan umum yang melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Angkutan umum ini seringkali menjadi kunci dari suksesnya sistem transportasi di suatu kawasan perkotaan. Semakin baik pelayanan angkutan umum di suatu kawasan perkotaan, maka akan semakin baik pula sistem transportasi di kota tersebut. Beberapa hal yang mengindikasikan tingkat pelayanan angkutan umum antara lain: kecepatan perjalanan, fasilitas perpindahan angkutan yang lebih baik, waktu tunggu lebih pendek, perlindungan dari cuaca yang lebih baik, tepat waktu, keterpaduan dengan moda angkutan lainnya, meningkatnya kemudahan menggunakan angkutan umum, serta informasi perjalanan kendaraan angkutan umum lebih jelas (Tamim, 2003 dalam Afriadi, 2012).

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pelayanan Angkutan Umum Dalam Kota (angkot) Berdasarkan Persepsi Penumpang Di Purwokerto.”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana persepsi penumpang terhadap pelayanan angkutan umum dalam kota (angkot) di Purwokerto ?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian diambil batasan masalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian angkutan umum dalam kota (angkot) di Purwokerto.
2. Hanya berfokus pada pelayanan angkutan umum dalam kota (angkot).
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil survey kuesioner yang dibagikan kepada responden (penumpang).
4. Hanya meneliti penumpang angkutan kota (angkot) yang ada di Purwokerto.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun atas, tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

Mengetahui persepsi penumpang terhadap pelayanan angkutan umum dalam kota (angkot) di Purwokerto.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan peneliti ini adalah:

### 1. Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan yang baru bagi peneliti.
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- c. Untuk menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan di bidang transportasi ke dalam dunia kerja.

### 2. Bagi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau referensi ilmiah guna penelitian lebih lanjut di bidang transportasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan

### 3. Bagi Lembaga Pemerintah dan Masyarakat

- a. Dapat mengetahui persepsi penumpang angkot dalam menilai pelayanan angkutan umum di Purwokerto.
- b. Bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan (kebijakan) transportasi khususnya, Kabupaten Banyumas dalam peningkatan mutu pelayanan yang berpihak pada masyarakat pengguna angkot di Purwokerto.